

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018-2021)

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD PUJI PRAWIROYUDO

NPM 1951031008



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018-2021)

Oleh

MUHAMMAD PUJI PRAWIROYUDO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

***The Influence Of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund On Capital Expenditure Budget Allocation
(Empirical Study On Regency And City Governments Throughout Indonesia In 2018-2021)***

By

MUHAMMAD PUJI PRAWIROYUDO

Demands for democratization and public sector reform have become a global phenomenon, including in Indonesia. Transparency and accountability come into play as a result of this demand for democracy. Both are important things in government administration, including in the field of state and regional financial management. This research aims to analyze the influence of economic growth, local revenue, general allocation funds and special allocation funds on the allocation of the capital expenditure budget. The sampling technique used in this research was purposive sampling. The type of data used is secondary data. The type of research used is quantitative research with data collection techniques, namely the Regional Revenue and Expenditure Budget Report (APBD) obtained from the Directorate General of Financial Balance and the Supreme Audit Agency (BPK) regarding Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Capital Expenditures and for Economic Growth (GRDP), data was obtained from the Central Statistics Agency for all regencies/cities in Indonesia for 2018-2021. The data analysis technique in this research was carried out using the SPSS26 method. The research results show that there is no positive influence between economic growth and capital expenditure. Meanwhile, local revenue, general allocation funds and special allocation funds have a positive effect on capital expenditure.

Keywords: *Capital Expenditure, Economic Growth, Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds*

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018-2021)

Oleh

MUHAMMAD PUJI PRAWIROYUDO

Tuntutan demokratisasi dan reformasi sektor publik telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai hasil dari tuntutan akan demokrasi ini. Keduanya merupakan hal penting dalam penyelenggaraan dipemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal serta untuk Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), data diperoleh dari Badan Pusat Statistik seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018 - 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

Judul Skripsi.

: **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018-2021)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Puji Prawiroyudo**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1951031008**

Program Studi

: **Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 19740312 200112 1003

2. Ketua Jurusan

Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19751026 200212 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

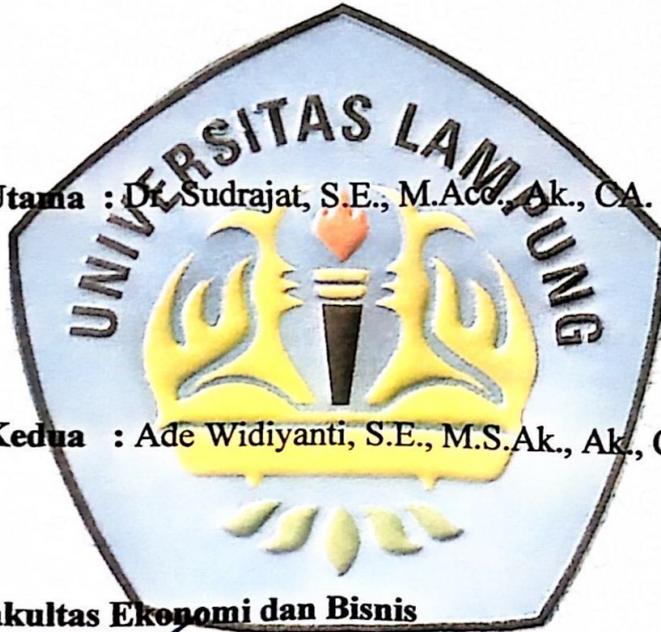
Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA.



Penguji Kedua : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Januari 2024

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Puji Prawiroyudo
NPM : 1951031008
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018-2021)”

telah ditulis dengan sungguh sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 16 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Puji Prawiroyudo
NPM. 1951031008

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda pada 21 Agustus 2001 sebagai putra ke-empat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ir. Erlan Murdiantono, M.M dan Ibu Dra. Yurida Herawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan anak-anak di TK Dharmawanita Kalianda pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar di SD Negeri 3 Wayurang Kalianda dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalianda yang diselesaikan pada Tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Atas di SMA Negeri 1 Kalianda hingga lulus pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar sebagai Anggota Bidang 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) Periode 2020/2021. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota PILAR pada periode 2020/2021.

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini. Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Erlan Murdiantono dan Ibunda Yurida Herawati

Terima kasih atas semua pengorbanan, doa, cinta dan kasih sayang yang kalian berikan mengantarku sampai kini. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan terbesarku untuk menyelesaikan pendidikan ini

Saudara Sekandung

Puji Permata Utami, Puji Kurnia Putri, dan Puji Indah Permatasari

Terima kasih atas dukungan dan semangat darimu yang selalu membangkitkanku

Teman dan Sahabat Terkasih Keluarga Besar Jurusan Akuntansi

Serta

Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

MOTO

“Jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”

--- Imam Asy-Syafi'i---

“Tidak ada orang yang memulai dari garis finish”

--- Penulis ---

“Jalani, Nikmati, Syukuri”

--- Penulis ---

“Gaji berjuta juta tak akan mampu membayar rakaat sholat yang sengaja kamu tinggalkan”

--- Penulis---

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018-2021)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan hidayah, pertolongan dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tuaku tersayang: Ayahanda Ir. Erlan Murdiantono, M.M dan Ibundaku Dra. Yurida Herawati, serta kakak-kakakku tersayang Puji Permata Utami, Puji Kurnia Putri, dan Puji Indah Permatasari dan Muhammad Puji Prawiroyudo, atas semua limpahan kasih sayang, doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan hingga tercapai penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc. Akt. sebagai Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

6. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. sebagai Dosen Penguji I, yang telah memberikan masukan, arahan, nasihat dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.
8. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Penguji II, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
11. Annisa Zahwa Salsabila, Terimakasih karena telah menjadi penyemangat, memberi solusi, segala waktu dan bantuannya.
12. Teman-teman Rivian, Tristan, Daffa, Adika, Galang, Inggit, Lucky, Gilang, Robby, Yoga, Arya, Strfanus, Evita, Nadin, Della, Nisa, Nyoman, dan Dani, terimakasih atas bantuan dan dukungan, menjadi teman belajar sekaligus pengikir kenangan dimasa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024
Penulis

Muhammad Puji Prawiroyudo

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>).....	9
2.1.2 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik	11
2.1.3.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif	11
2.1.3.2 Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik....	11
2.1.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia	12
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.1.6 Belanja Modal	13
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.8 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.9 Dana Alokasi Umum	14
2.1.10 Dana Alokasi Khusus	15
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Penelitian	17
2.4 Pengembangan Hipotesis	18

2.4.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal.....	18
2.4.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.....	18
2.4.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.....	20
2.4.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal.....	20
III. METODOLOGI PENELITIAN.....		22
3.1	Jenis Penelitian.....	22
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3	Populasi dan Sampel.....	22
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	23
3.3.1	Variabel Independen.....	23
3.4.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	23
3.4.1.2	Anggaran Pendapatan Asli Daerah.....	24
3.4.1.3	Anggaran Dana Alokasi Umum.....	24
3.4.1.4	Anggaran Dana Alokasi Khusus.....	25
3.4.2	Variabel Dependen.....	25
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6	Metode Analisis Data.....	26
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	26
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	27
3.6.2.1	Uji Normalitas.....	27
3.6.2.2	Uji Multikolinieritas.....	28
3.6.2.3	Uji Autokorelasi.....	28
3.6.2.4	Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	29
3.6.3	Metode Regresi Linier Berganda.....	29
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	30
3.6.4.1	Koefisien Determinasi.....	30
3.6.4.2	Pengujian Simultan (Uji Statistik f).....	30
3.6.4.3	Pengujian Parsial (Uji Statistik t).....	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	32
4.2	Hasil Penelitian.....	33

4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	33
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	38
4.2.2.1	Uji Normalitas	38
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	39
4.2.2.3	Uji Autokorelasi	40
4.2.2.4	Uji Heteroskedastisitas	41
4.2.3	Analisis Regresi Berganda	42
4.2.4	Uji Hipotesis.....	44
4.2.4.1	Uji Koefisien Determinasi.....	44
4.2.4.2	Uji Hipotesis Simultan	45
4.2.4.3	Uji Parsial.....	45
4.3	Pembahasan Mengenai Hipotesis Penelitian.....	46
4.3.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal ...	46
4.3.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal ...	47
4.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	48
4.3.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.....	48
4.4	Analisis Tambahan Uji Beda.....	49
4.5	Ringkasan Hipotesis dan Hasil.....	53
V. KESIMPULAN DAN SARAN		52
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Keterbatasan Penelitian	54
5.3	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN.....		60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten /Kota 2018-2021	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. 1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	28
Tabel 4.1 Populasi pada Penelitian	32
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	38
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Park.....	42
Tabel 4.7 Hasil Linier Regresi Berganda.....	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	44
Tabel 4.9 Hasil Uji F	45
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Beda.....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>Mean Paired Sample T-Test</i>	51
Tabel 4.13 Kesimpulan dan Hipotesis.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	17
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas <i>Probability Plot</i>	39
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran Tabulasi Data	60
Lampiran Output SPSS	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan demokratisasi dan reformasi sektor publik telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai hasil dari tuntutan akan demokrasi ini. Keduanya merupakan hal penting dalam penyelenggaraan dipemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Akuntabilitas publik adalah bentuk kewajiban dalam penyediaan informasi dan pengungkapan semua kegiatan dan pekerjaan keuangan Pemerintah Daerah kepada pihak yang berkepentingan. Investor, pengamat ekonomi, pengamat politik dan masyarakat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Reformasi pemerintahan yang diikuti penyelesaian sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan akan aspek transparansi dan akuntabilitas serta mendorong terjadinya proses transisi dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang dikenal dengan otonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan kemampuan daerahnya sendiri. Dalam memenuhi segala kebutuhan pembiayaan atau pendanaan, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan berbagai inovasi agar dapat menggali sumber-sumber pendapatan di setiap daerah karena pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat dinilai lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerahnya masing-masing.

Suatu daerah dikatakan otonom dan mampu mandiri tergantung dari bagaimana daerah itu mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dengan menerapkan strategi alokasi belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya (Machmud, 2014). Porsi anggaran belanja modal harus lebih ditingkatkan lagi untuk mengembangkan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan daerah, karena belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah dan memiliki manfaat jangka panjang serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menerapkan salah satu landasan yaitu kemandirian dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari komponen PAD, adapun komponen PAD dengan kontribusi terbesar yaitu pada pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya sendiri dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal, sehingga daerah diberikan kesempatan yang besar untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Desentralisasi telah menghasilkan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik jika perekonomian daerah berkembang dengan baik. Pembangunan infrastruktur di suatu wilayah memiliki dampak yang signifikan terhadap laju perekonomian wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur juga secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang biasanya diukur dengan tingkat pendapatan riil perkapita (Suparmoko dalam Barimbing & Karmini, 2015). Infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi, persiapan infrastruktur yang baik maka akan meningkatkan produktivitas (Wayan *et al.*, 2017).

APBD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah daerah diberi kewenangan memungut pajak atau retribusi dan mengelola berbagai Sumber Daya Alam dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas desentralisasi. pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), pinjaman daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan merupakan sumber dana daerah. Pemerintah daerah mengelola langsung tiga sumber pertama melalui APBD, sedangkan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelola sumber sisanya.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018-2021 merupakan gambaran langkah konkrit yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanannya. Berikut tabel ringkasan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota se-Indonesia tahun 2018-2021.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2021

Indikator (<i>Indicator</i>)	Anggaran APBD (Miliar)			
	2018	2019	2020	2021
PAD Pemerintah Kabupaten/Kota <i>Local Own-Source Revenue</i>	269.908	295.522	328.418	310.168
Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Fund</i>	401.489	421.340	384.381	377.791
Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Fund</i>	62.436	69.326	53.787	63.648
Belanja Modal <i>Capita Expenditure</i>	223.655	238.368	236.668	196.815
Pertumbuhan PDB 2019/ <i>Growth of GDP 2018</i> : 5,17% Pertumbuhan PDB 2019/ <i>Growth of GDP 2019</i> : 5,02% Pertumbuhan PDB 2020/ <i>Growth of GDP 2020</i> : -2,07% Pertumbuhan PDB 2021/ <i>Growth of GDP 2021</i> : 3,69%				

Sumber : *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Kementerian Keuangan*

Pemerintah daerah dituntut menjadi penggerak utama dalam perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai acuan secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 tercatat sebesar 5,17 persen dan pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,02 persen. Pemerintah menghadapi tantangan baru di tahun 2020. Indonesia mengalami tantangan berat yaitu pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung memengaruhi kegiatan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,07 persen.

Pemerintahan kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota dalam kurun tahun 2018-2021 proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) daerah masih sangat tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah pada pasokan dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan tidak stabilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Indonesia terhadap anggaran.

Pemulihan ekonomi diharapkan berjalan secara efektif, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus dan serius dalam penanganan kasus Covid-19 dengan cara meningkatkan kemandirian daerah dalam peranan pendapatan asli daerah. Dalam APBD, pendapatan asli daerah dianggap sebagai sumber pembiayaan utama akibatnya pemerintah daerah perlu menggali potensi di luar pajak dan retribusi daerah.

Fenomena kasus pandemi global ini membuat pemerintah pusat memerlukan kebijakan dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah atas kewenangan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan, menyediakan fasilitas, dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah daerah. Selanjutnya, dengan pendekatan kelompok dalam pelayanan pemerintah, masyarakat dapat menyaring dan mengatur penggunaan aset yang dihasilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga mengurangi pemborosan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan berfokus pada kesehatan dan

pemulihan global akibat pandemi Covid-19.

Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD, diharapkan akan lebih baik lagi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sugiyanta, 2016).

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan proporsi belanja daerah yang ditunjukkan untuk belanja modal sebagai stimulus pembangunan. Belanja modal itu sendiri ditambah belanja barang dan jasa, ialah belanja pemerintah yang diharapkan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasionya, maka semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dimodifikasi dari Sudika & Budiarta (2017) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja modal Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota Periode 2010-2014.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dan memperluas cakupan penelitian yaitu seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia selama tahun 2018-2020.

Penelitian yang dilakukan Sudika & Budarta (2017) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi Bali. Hasil membuktikan bahwa Pajak Daerah, DAU dan DAK memiliki pengaruh positif kepada belanja modal. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Meianto *et al.* (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan pada tahun 2012-2013. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh secara negatif dan DAK tidak berpengaruh secara positif.

Menurut Priambudi (2017) yang melakukan penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dan dana alokasi umum juga berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Peneliti akan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistika (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, tetapi hanya dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Maka dalam penelitian ini akan menambahkan variabel pendapatan asli daerah, dan lingkup cakupan akan lebih luas yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan total 508 Kabupaten/Kota.

Temuan penelitian ini akan menjadi bahan identifikasi potensi dan sumber perolehan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat mengenai alternatif sumber-sumber penerimaan daerah guna membiaya pemerintahan daerah. Secara implisit ketersediaan data mengenai perkembangan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran daerah dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pola kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di suatu daerah serta untuk mengevaluasi mengenai pengalokasian belanja modal seluruh kabupaten dan kota di Indonesia secara lebih efektif dan efisien serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian dan

desentralisasi fiskal daerah di era otonomi daerah saat ini. Peneliti memutuskan untuk mengambil Judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun (2018-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?
4. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja modal.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi anggaran belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus serta hubungan terhadap belanja modal.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Indonesia dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan dapat menggunakan dana alokasi umum dan dana alokasi yang ditargetkan untuk memaksimalkan pembangunan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh daerah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi. Kesuksesan organisasi mencerminkan maksimalisasi utilitas kelompok principal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1991).

Teori *Stewardship* yang memberikan pandangan bahwa di dalam sebuah organisasi yang kuat terdapat kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan guna mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akuntansi sebagai instrumen utama informasi keuangan (*driver*) seiring dengan berkembangnya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan meningkatnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi yang semakin kompleks dengan meningkatnya syarat akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, prinsipal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi pengelolaannya (Pealeu, 2013).

Teori stewardship dalam konteks keuangan publik berkaitan dengan tanggung jawab dan peran pemerintah sebagai pengelola aset dan sumber daya keuangan untuk kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan pada konsep bahwa pemerintah bertindak sebagai "pengurus" atau "steward" atas kekayaan dan sumber

daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab juga dengan memaksimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga target ekonomi dapat tercapai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Teori *stewardship* pada penelitian ini dapat menjadi landasan untuk prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengelola pendapatan asli daerah, dan melaksanakan belanja modal.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam teori keagenan terdapat dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agen*. Hubungan *principal* dan *agen* terjadi ketika tindakan yang dilakukan seseorang memiliki pengaruh kepada orang lain atau ketika seseorang sangat bergantung kepada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diciptakan pada kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Teori agensi lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi pada bisnis. Menurut Bergman & Lane (1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia mengatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal* dan *agen*. Hal ini ditunjukkan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut memisahkan dengan tegas antara pemerintah daerah (*eksekutif*) dengan fungsi perwalian rakyat (*legislatif*). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, *eksekutif* melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan *legislatif* terlibat langsung dalam pelaksanaan legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Teori ini menjelaskan adanya kepentingan antara pihak manajerial dengan pemilik yang kepentingannya tidak sama, sehingga dapat menimbulkan konflik. Konflik ini disebut dengan konflik keagenan. Dalam teori

ini, hak masing-masing pihak dapat dibagi sama rata atau disamakan antara agen dan prinsipal, serta dalam hal kewajiban dan kepentingan masing-masing pihak. Inti dari teori keagenan adalah menggabungkan antara kepentingan prinsipal dan agen sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.

2.1.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dan agen sebagai pihak lainnya yang terikat oleh suatu perjanjian kontraktual. Pihak prinsipal merupakan pihak yang memiliki tugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah pada kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen bertugas untuk menerima dan melaksanakan kontrak sesuai dengan keinginan pihak prinsipal.

2.1.3.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, pihak eksekutif adalah agen dan pihak legislatif adalah prinsipal (Abdullah & Halim, 2006). Seperti yang disampaikan sebelumnya, diantara hubungan prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah mengenai keagenan. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul antara eksekutif dan legislatif juga merupakan masalah keagenan.

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif Pemerintah Daerah (PEMDA) bertindak sebagai agen dan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak sebagai prinsipal. Pemerintah daerah menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk ditinjau. Jika RAPBD telah sesuai dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pihak legislatif (DPRD) digunakan sebagai alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemerintah Daerah).

2.1.3.2 Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik

Dalam hubungan mengenai legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Hagen (2003) bahwa

hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana berupa pembayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, sehingga DPRD diharapkan dapat mewakili kepentingan publik, meskipun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik, sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

2.1.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman dengan kebijakan umum APBD dan plafon anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian disampaikan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari perspektif keagenan, APBD adalah bentuk kontrak yang digunakan oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan susunan/rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. Anggaran daerah ialah salah satu peran yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerahnya. Mengingat peran APBD sangat penting karena APBD sebagai alat untuk pendorong atau penentu tercapainya target ekonomi dan sarana makro ekonomi daerah dan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang terjadi di masyarakat yang merupakan suatu tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas program pembangunan tahunan.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/Tahun 2013, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa jenis-jenis belanja modal yaitu 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya/ Aset non lancar lainnya, 6) Belanja Modal Aset Lainnya.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Ukuran yang terpenting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, diantaranya yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, teknologi, komunikasi, transportasi, komposisi sektor industri, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintahan daerah, pembangunan sarana dan prasarana berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat dasar untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.8 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah itu. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah untuk memenuhi belanjanya terutama untuk belanja modal. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bila disesuaikan dengan Teori Agensi Jensen & Meckling (1976), hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan asli daerah tercermin dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal, sedangkan belanja modal itu sendiri merupakan salah satu sumber pembiayaannya dari Pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah melalui pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain.

2.1.9 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan disalurkan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum menunjukkan bahwa daerah miskin dan tertinggal harus menerima lebih banyak dari pada daerah yang kaya (Kuncoro, 2014). Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, maka pemerintahan daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD sendiri untuk membiayai belanja modal yang mendukung tujuan pemerintah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik. Transfer DAU yang berasal pemerintah pusat dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana melalui alokasi anggaran belanja modal, dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan pula dapat mendorong peningkatan terhadap pendapatan masyarakat.

2.1.10 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diberikan untuk daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk membiayai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional di daerah tersebut. Menurut (Febriana & Praptoyo, 2015) mengatakan bahwa DAK yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat digunakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan prioritas nasional. Penelitian Febriana dan Praptoyo (2015) menemukan bahwa DAK berpengaruh secara positif alokasi belanja modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Terkait	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sudika & Budiarta (2017)	Variabel dependen menggunakan Belanja Modal dan variabel independen menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.	Penelitian ini menggunakan 46 sampel dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Sampel yang diambil seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014.	Variabel pajak daerah, dana DAU dan dana DAK memiliki pengaruh positif signifikan pada belanja modal. Adapun retribusi daerah tidak memiliki pengaruh pada belanja modal.
2.	Edy Meianto <i>et al</i> (2013)	Variabel dependen menggunakan belanja modal dan variabel independen menggunakan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli	Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 sampel yang diambil menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Penelitian ini memperoleh data sekunder yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum

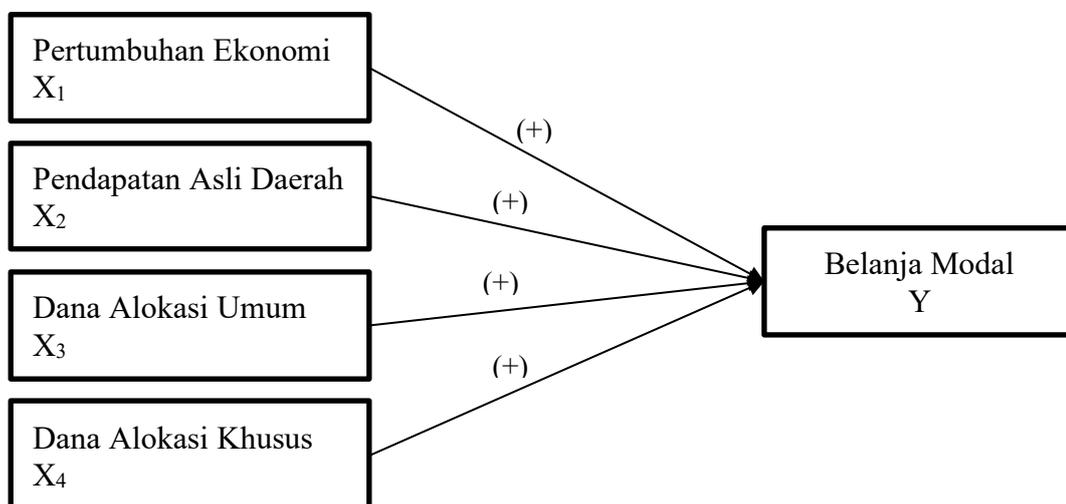
No.	Nama Peneliti	Variabel Terkait	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Daerah dan Luas Wilayah.	Selatan untuk Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2012-2013.	tidak berpengaruh secara negatif. Dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara positif.
3.	Wertianti (2013)	Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel dependen Belanja Modal, serta menggunakan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi.	Penelitian ini mencakup 9 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang mana data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
4.	Hairiyah <i>et al</i> (2017)	Variabel independen di dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Variabel dependennya yaitu Belanja Modal.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari BPS Kalimantan Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum negatif terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
5.	Ayem & Pratama (2018)	Variabel dependen yang digunakan yaitu Belanja Modal. Variabel independen yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana	Penelitian ini menggunakan data sekunder pada Badan Pusat Statistika (BPS) dan sampel yang digunakan terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya di D.I Yogyakarta pada Tahun 2011-2016.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

No.	Nama Peneliti	Variabel Terkait	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.		Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini mengacu dan dimodifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sudika dan Budiarta, 2017). Penelitian kali ini menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel Belanja Modal.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal yang didasari oleh teori *Stewardship* dan teori agensi ini memiliki hubungan. Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Teori keagenan memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Masyarakat sebagai pihak *principal* juga akan melakukan produktivitas ekonomi dalam suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri.

Menurut penelitian Ayem & Pratama (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah, oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendapatan asli daerah dengan belanja modal yang didasari oleh teori *Stewardship* dan teori keagenan ini memiliki hubungan. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan teori *Stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan bahwa keberadaan Pemerintah Daerah

sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Masyarakat sebagai pihak *principal* telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku *agent* sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar kewenangan pemerintahan daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi melalui alokasi belanja modal (Solikin, 2010).

Sari dan Novitasari (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat membuktikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Dalam menyusun APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhitungkan PAD yang diterima. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali sumber PAD yang sebesar-besarnya. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum dengan teori Stewardship dan teori keagenan ini memiliki hubungan. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan teori *Stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Kegiatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk tercapainya pemerataan dalam hal finansial antara daerah satu dengan lainnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Artinya bahwa penerimaan DAU setiap daerah tidak ada kesamaan. Menurut Kolinug *et al.* (2015) menyatakan bahwa daerah dengan PAD yang rendah akan mendapatkan DAU yang tinggi serta sebaliknya. Oleh karena itu, seharusnya DAU akan memiliki efek distributif dan alokatif yang sama dengan PAD.

Kenyataannya, dalam studi empiris pengeluaran daerah oleh DAU seringkali lebih tinggi dibandingkan pengeluaran oleh PAD. Hasil penelitian sebelumnya oleh Palupi (2018) menunjukkan bahwa DAU memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. Berdasarkan atas hasil penelitian terdahulu, maka dapat dibentuk sebuah hipotesis sebagai berikut :

H3: Perubahan DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana alokasi khusus dengan belanja modal yang didasari oleh teori Stewardship dan teori keagenan ini memiliki hubungan. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan teori *Stewardship* dengan penelitian

ini yaitu, dimana terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Pemerintah daerah wajib mengurus masyarakatnya karena dana alokasi khusus diarahkan untuk membantu membiayai kegiatan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai.

Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintahan daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, peningkatan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan mengarahkan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang dialokasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara itu, lembaga (*The SMERU Research Institute*) menyampaikan bahwa dana alokasi khusus ialah salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Berdasarkan hubungan teori *Stewardship* dan teori keagenan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disampaikan, serta berdasarkan penelitian terdahulu maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode pada pengujian teori secara objektif untuk mengetahui hubungan antar variabel (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*) (Martono, 2015). Alasan peneliti memilih pendekatan ini karena untuk memaparkan suatu fenomena ataupun gejala sosial yang memberikan hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Penelitian eksplanatori juga menjelaskan arah hubungan pola-pola dan juga perbedaan, namun memiliki keterkaitan yang menghasilkan hubungan sebab akibat. Selain itu, pendekatan eksplanatori ini untuk memperjelas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik parsial maupun simultan yang ada pada hipotesis.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari laporan APBD yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari laporan APBD seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018-2021 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK),

3.3 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah generalisasi terhadap objek atau subjek yang terdapat kualitas dan karakteristik tertentu dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari secara mendalam serta dapat di tarik sebuah kesimpulan. Populasi juga dapat mengacu seluruh kelompok orang, peristiwa atau terdapat hal-hal

menarik yang ingin di teliti dan dikaji mendalam serta dapat disimpulkan (Bougie & Sekaran, 2020). Penentuan populasi merupakan tahapan penting dalam penelitian. Populasi dapat memberikan informasi atau data yang berguna bagi suatu penelitian. Populasi pada penelitian ini merupakan Pemerintahan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, terdiri atas 415 Kabupaten dan 93 Kota dengan total 508 Kabupaten/Kota di Indonesia dan data yang digunakan bersumber dari Tahun 2018-2021.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah pengukuran variabel yang dilakukannya penelitian memiliki operasional yang berkaitan dengan adanya sebuah proses pada pengukuran variabel tersebut (Sarwono, 2006). Dapat dikatakan definisi operasional kedalam satu definisi untuk memperjelas dari adanya konsep variabel dalam instrumen pengukuran. Alasan peneliti menggunakan definisi operasional adalah untuk mempermudah memahami hubungan variabel yang diteliti serta menjabarkan variabel beserta pengukurannya.

Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang akan diukur dalam penelitian. Variabel terdiri dari 2 yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu belanja modal.

3.3.1 Variabel Independen

3.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt} - 1)}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Keterangan :

PDRBt : Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang

PDRBt-1 : Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sebelumnya

3.4.1.2 Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk dijadikan sebagai modal dasar pemerintah daerah guna membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengukuran pendapatan asli daerah yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}$$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

3.4.1.3 Anggaran Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan di seluruh daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat pada pos dana perimbangan dalam laporan APBD. Rumusan DAU untuk daerah kabupaten/kota, ditetapkan sebagai berikut sebelum diundang-undangkan Undang-undang (UU)

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

3.4.1.4 Anggaran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang. Perhitungan penerimaan DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, serta kriteria teknis. Dalam menentukan besaran DAK yang akan dialokasikan kepada setiap daerah, maka akan menggunakan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat pada pos anggaran Dana Alokasi Khusus dalam Laporan APBD.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen/bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pengalokasian belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selain itu, perhitungan belanja modal dikategorikan sebagai Anggaran Belanja Modal (ABM) yang dihitung berdasarkan total anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBD :

$$\text{Belanja Modal}_{ti} = \text{Belanja Tanah}_{ti} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin}_{ti} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan}_{ti} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan}_{ti} + \text{Belanja Aset Lainnya}_{ti}$$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Keterangan :

Belanja Modal_{ti} : Belanja Modal Tahun Tertentu

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Penelitian ini mengambil data sekunder dengan melihat data Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal serta untuk Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) diperoleh data dari Badan Pusat Statistika untuk Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018-2021.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh secara lengkap dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian, memperlihatkan hubungan antar fenomena yang diteliti, dan memberikan jawaban hipotesis yang diajukan. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan dalam pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang penting dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS 26 *for windows* dalam menganalisis data. Data yang berasal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistika (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut :

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum data dalam penelitian dan tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Penyajian statistik deskriptif juga bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka data telah diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar agar dapat diketahui sejauh mana hasil regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya. Pengujian asumsi klasik secara umum meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Jenis pengujian asumsi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan untuk penelitian adalah data yang berdistribusi normal (Nugroho, 2005), untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, kita dapat melihat melalui *normal probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sebenarnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2005). Selain itu pengujian normalitas residual dengan menggunakan uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* memiliki nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data

residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2005).

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat variabel independen yang memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dalam satu model (Nugroho, 2005). Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat ketika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasinya antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika ada korelasinya, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson Test*, yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji statistik Durbin. Jika Durbin Watson memiliki nilai yang berada diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005).

Tabel 3. 1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Jika	Keputusan
$d < d_l$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu perbaikan.
$d_l < d < d_u$	Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4 - d_u < d < 4 - d_l$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik

4 -dl < d	Masalah autokorelasi serius
-----------	-----------------------------

Sumber : Ghozali (2021)

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2021). Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut *homokedastisitas*, tetapi jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen dengan residual. Jika dalam gambar tersebut tidak memiliki pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terjadi heterokedastisitas.

Selain itu, Onifade & Olanrewaju (2020) juga menyebutkan bahwa uji Park dapat digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Uji park menyatakan bahwa *varians* merupakan fungsi dari variabel-variabel independen (Ghozali, 2021). Perhitungan uji Park pada penelitian ini menggunakan bantuan *software* IBM SPSS 25 yang dilakukan dengan memunculkan nilai residual pada analisis regresi. Kemudian, melakukan *compute* kuadrat dan logaritma natural pada nilai residual (Onifade & Olanrewaju, 2020). Uji park akan meregresikan variabel bebas terhadap hasil *compute* nilai residual logaritma natural kuadrat. Jika β ternyata signifikan secara statistik atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka menunjukkan bahwa terdapat heteroskedastisitas pada data. Jika tidak signifikan atau nilai signifikansi $> 0,05$, maka kita dapat menerima asumsi homogenitas *varians* (Onifade & Olanrewaju, 2020).

3.6.3 Metode Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk memproyeksikan besarnya kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1PE + \beta_2PAD + \beta_3DAU + \beta_3DAK$$

Keterangan :

- Y = Belanja Modal (BM)
 α = Konstanta
 β = Slope atau Koefisien Regresi
 PE = Pertumbuhan Ekonomi
 PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
 DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Secara statistik, akurasi fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai sebenarnya dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik f, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak).

3.6.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen yang terlihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2021). Nilai *R-squared* (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

3.6.4.2 Pengujian Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian simultan ini bertujuan untuk membuktikan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji F dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS

pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Sehingga berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4.3 Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Ghozali (2021) menyebutkan bahwa uji statistik t pada dasarnya menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Uji Statistik t untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). *Output* hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan keputusan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu sebagai berikut :

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima sehingga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya signifikansi sebesar 0,415 dan t hitung sebesar 0,815. Nilai signifikansi Pertumbuhan Ekonomi lebih besar dari signifikansi yang diharapkan (0,05), menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 15,880. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari signifikansi yang diharapkan (0,05), menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya signifikansi sebesar 0,005 dan t hitung sebesar 2,790. Nilai signifikansi Dana Alokasi Umum lebih kecil dari signifikansi yang diharapkan (0,05), menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 9,138. Nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus lebih kecil dari signifikansi yang diharapkan (0,05), menunjukkan bahwa hipotesis ke empat diterima.

5. Hasil Koefisien determinasi dalam penelitian ini memperoleh nilai Adj R Square sebesar 0,384. hal ini menunjukkan bahwa 38,3% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 61,7% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Tahun penelitian hanya menggunakan periode selama 4 tahun sehingga kurang menunjukkan keadaan perekonomian Indonesia pada tahun sebelumnya.
2. Penggunaan variabel yang mempengaruhi Belanja Modal hanya menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Masih banyak variabel lain yang berpengaruh dan tidak disertakan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Setelah dituliskannya kesimpulan atas penelitian di atas, maka dari itu peneliti merasa perlu memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun saran-saran berkaitan dengan ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Indonesia dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan dapat menggunakan dana alokasi umum dan dana alokasi yang ditargetkan untuk memaksimalkan pembangunan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh daerah tersebut.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan dalam untuk menambahkan tahun penelitian terbaru sehingga akan menunjukkan perbedaan penelitian setelah Covid-19.
3. Bagi akademik, penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi khusus dibidang kajian yang membahas tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan menambah variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Seperti contohnya variabel SILPA dan Dana Bagi Hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2168571>
- Adiwiyana, Priya. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomu Universitas Diponegoro.
- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UB Press.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi DI Yogyakarta. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.26460/AD.V2I2.2987>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved February 1, 2023, from <https://www.bps.go.id/>.
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business* (8th ed.). John Wiley & Sons Inc.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage.
- Dewi, N. I., & Citra, M. F. (2021). The Impact on Economic and Environmental Development of COVID-19 Pandemic: a Case Study In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 1–11. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Kementerian Keuangan. (n.d.). Retrieved January 29, 2023, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>.

- Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans (JIRA)*, 4(9).
- Ghozali, H. I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. In *International Journal of Physiology* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (1999). *Essentials of Econometrics*. McGraw-Hill.
- Hagen, J. Von. (2003). *Budgeting Institutions And Public Spending*. 1–39.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *KINERJA*, 14(2), 85–91. <https://doi.org/10.30872/JKIN.V14I2.2483>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2021, January 1). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Desember 2020*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://doi.org/10.35794/EMBA.3.1.2015.7556>.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347827>.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19168>.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci (Sampel halaman)*. Nanang Martono.
- Meianto, E., Dhia Wenny, C., Multi Data Palembang, S., Rajawali No, J., Akuntansi, J., Kunci, K., Alokasi Umum, D., Alokasi Khusus, D., & Asli Daerah Luas Wilayah dan Belanja Modal, P. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. 2012–2013.

- Nugroho, B. A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=482838>.
- Onifade, O. C., & Olanrewaju, S. O. (2020). Investigating Performances of Some Statistical Tests for Heteroscedasticity Assumption in Generalized Linear Model: A Monte Carlo Simulations Study. *Open Journal of Statistics*, 10(03), 453–493. <https://doi.org/10.4236/ojs.2020.103029>.
- Palupi, F. A. D. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal*. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/563>.
- Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1189–1197. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.4.2013.2892>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/ Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar [BPK RI]*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [BPK RI]*. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [BPK RI]*. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 136–147. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V6I1.14338>.
- Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.22225.KR.9.1.325.15-29>.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Edisi 1). Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sekaran Uma, B. R. (1992). Research Method in Business. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–447.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta: Bandung.
- Situngkir, A. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*.

- Solikin, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Jawa Barat. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 1(2), 165–178. <https://doi.org/10.17509/JASET.V1I2.9927>.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689–1718. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.V21.I02.P30>.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19–40. <https://doi.org/10.19184/JAUJ.V14I1.2504>.
- Suparmoko dalam Barimbing, Y. R., & Karmini, N. L. (2015). Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 434–450.
- The SMERU Research Institute. (n.d.). Retrieved January 29, 2023, from <https://smeru.or.id/>.
- Wayan, N., Dewi, R., Gede, D., & Suputra, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1745–1773.
- Wertianti, I. G. A. G. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.